



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN I

DIREKTORAT PENGAWASAN
PENGELOLAAN SUMBER
DAYA KELAUTAN

Tahun
2023

KATA PENGANTAR

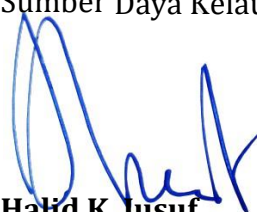


Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa kami panjatkan, karena atas karunia-Nya, Laporan Kinerja Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan triwulan I tahun 2023 dapat disusun dengan baik. Ucapan terima kasih tidak lupa kami sampaikan kepada para pihak yang telah membantudalam proses penyusunan laporan ini.

Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban Direktorat PPSDK atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama periode triwulan I tahun 2023. Laporan ini menyajikan data, informasi dan gambaran tentang capaian berbagai kegiatan dan kendala dalam pelaksanaan program pengawasan sumber daya kelautan. Dengan adanya laporan ini diharapkan dapat meningkatkan peran dan kinerja Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan ke depannya.

Kami menyadari bahwa dalam pembuatan laporan ini masih terdapat kekurangan, untuk itu kami mengharapkan masukan dan saran demi kesempurnaan dalam pembuatan laporan ini agar sesuai dengan yang diharapkan serta dapat memberikan pandangan dan arah yang jelas sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan

Jakarta, 14 April 2023
Direktur Pengawasan Pengelolaan
Sumber Daya Kelautan



Halid K. Jusuf

EXECUTIVE SUMMARY

Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan (PPSDK) dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Ditjen PSDKP 2020-2024 yang tertuang dalam 5 sasaran kinerja dan 17 indikator kinerja. Adapun indikator kinerja dimaksud yaitu:

1. Nilai pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya kelautan yang bertanggung jawab (nilai)
2. Persentase Penyelesaian verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha kelautan (%)
3. Persentase penyelesaian tindak lanjut pembinaan dan perbaikan pelaku usaha kelautan (%)
4. Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Direktorat PPSDK (%)
5. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat PPSDK (%)
6. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat PPSDK (indeks)
7. Tingkat pemahaman peserta Bimtek dan pelatihan lingkup Direktorat PPSDK
8. Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Direktorat PPSDK
9. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat PPSDK yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)
10. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (nilai)

11. Jumlah inovasi yang dihasilkan Direktorat PPSDK (inovasi)
12. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat PPSDK
13. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Direktorat PPSDK (%)
14. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Direktorat PPSDK (%)

Pada triwulan I tahun 2023, seluruh indikator kinerja yang dilakukan pengukuran telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Kesebelas indikator kinerja selanjutnya diukur melalui aplikasi KINERJAKU (<http://kinerjaku.kkp.go.id/>) maka capaian kinerja Direktorat PPSDK pada triwulan I tahun 2023 ini menghasilkan nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) sebesar 111,26. Nilai ini mengindikasikan kinerja Direktorat PPSDK termasuk dalam kategori baik.

Alokasi anggaran Direktorat PPSDK pada tahun 2023 adalah Rp 8.235.790.000,- namun karena kebijakan *Automatic Adjustment* maka menjadi Rp 5.947.064.000,-. Sedangkan realisasi anggaran triwulan I adalah sebesar Rp 2.321.603.350,- sebesar 39,04%,-.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
EXCUTIVE SUMMARY	ii
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Isu Aktual Pengawasan Sumber Daya Kelautan	3
D. Tugas dan Fungsi	3
E. Struktur Organisasi	4
F. Sistematika Penyajian Laporan	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
A. Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	6
B. Rencana Kerja Direktorat PPSDK Tahun 2023	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	10
A. Capaian Kinerja Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Triwulan I Tahun 2023	10
B. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja	11
C. Realisasi Anggaran	14
BAB IV PENUTUP	16
A. KESIMPULAN	16
B. REKOMENDASI	16

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan di dunia yang memiliki keanekaragaman hayati laut yang melimpah. Dengan luas wilayah perairan 6.315.222 km² dan panjang garis pantai kira-kira 99.093 km (BIG, 2014), potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki turut menyumbang Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sektor kelautan dan perikanan sebesar Rp. 262 triliun untuk harga konstan dan Rp. 342.7 triliun untuk harga berlaku pada tahun 2014 dengan laju pertumbuhan sebesar 7.55 persen, lebih besar dari laju pertumbuhan PDB nasional Indonesia dengan capaian 5.02 persen (Pusdatin KKP, 2016). Sektor kelautan dan perikanan yang turut menyumbang PDB berasal dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, serta industri pengolahan kelautan dan perikanan untuk konsumsi domestik maupun ekspor.

Pertumbuhan penduduk Indonesia mengalami peningkatan yang tentu juga mempengaruhi ketersediaan jumlah sumber daya alam yang pemanfaatannya juga semakin besar. Hal ini tentu bisa menimbulkan tidak hanya penurunan sediaan sumberdaya alam namun juga bisa menimbulkan kerusakan pada sumberdaya alam yang dimanfaatkan karena kepentingan masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya alam yang tersedia begitu beragam. Oleh karena itu, diperlukan penataan dan manajemen yang baik dalam memanfaatkan dan mengelola sumberdaya alam yang tersedia, salah satunya sumberdaya kelautan dan perikanan. Dengan manajemen pemanfaatan dan pengelolaan yang baik diharapkan masyarakat dapat memperoleh manfaat yang berkesinambungan dan dalam waktu yang cukup lama. Untuk itu diperlukan adanya pengawasan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagai salah satu bagian dari kementerian dan/atau lembaga resmi negara sangat substansial perannya dalam mengawasi pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal PSDKP mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan

pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. lebih lanjut, dalam rangka meminimalkan tingkat kerusakan yang terjadi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan, maka Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan (PPSDK) sebagai salah satu unit kerja pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan agar dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab untuk menjaga manfaat, kelestarian maupun nilai dan fungsinya sesuai dengan amanat UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan dan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan pada tahun 2023, dilaksanakan oleh Direktorat PPSDK untuk mewujudkan kepatuhan pelaku usaha kelautan. Di samping itu, Direktorat PPSDK bertugas untuk mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Destructive fishing yang merupakan kegiatan prioritas nasional Direktorat Jenderal PSDKP.

Untuk mewujudkan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan yang handal, profesional, akuntabel, efektif dan efisien diperlukan adanya manajemen kinerja yang di dalamnya meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengukuran dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan. Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Direktorat PPSDK sebagai unsur penyelenggara negara diwajibkan menetapkan target kinerja serta melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapainya. Pengukuran kinerja Direktorat PPSDK tahun 2023 ditetapkan dilakukan secara berkala melalui beberapa mekanisme yaitu (1) pengukuran kinerja periode bulanan; (2) pengukuran kinerja periode triwulan; dan (3) pengukuran kinerja periode tahunan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Direktorat PPSDK tahun 2023 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Direktur PPSDK atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah

ditetapkan. Sedangkan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Direktorat PPSDK tahun 2023 adalah sebagai bahan rujukan dalam merumuskan berbagai rekomendasi sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan pada tugas pengawasan pada masa tugas selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi capaian kinerja pada periode tahun 2023.

C. Isu Aktual Pengawasan Sumber Daya Kelautan

Isu aktual dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan tahun 2023 yang menjadi fokus pengawasan, antara lain:

1. Kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi perairan;
2. Kerusakan terumbu karang akibat penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan;
3. Kerusakan ekosistem terumbu karang akibat kandasnya kapal;
4. Pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Pencemaran perairan pesisir dan laut akibat kegiatan perikanan dan kapal bermuatan yang kandas atau bocor;
6. Pemanfaatan ruang laut tanpa disertai Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut;
7. Kerusakan lahan pesisir akibat maraknya penambangan pasir;
8. Penambangan pasir laut secara ilegal;
9. Pemanfaatan pesisir untuk kegiatan reklamasi yang tidak berizin; dan
10. Pemanfaatan pulau-pulau kecil oleh asing.

D. Tugas dan Fungsi

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 486/PERMEN-KP/2020 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat PPSDK bertugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan. Sedangkan fungsi yang diselenggarakan oleh Direktorat PPSDK adalah:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemanfaatan ruang laut dan pencemaran perairan, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil,

- pengawasan produk dan jasa kelautan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan;
2. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemanfaatan ruang laut dan pencemaran perairan, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan produk dan jasa kelautan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan;
 3. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemanfaatan ruang laut dan pencemaran perairan, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan produk dan jasa kelautan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan;
 4. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pemanfaatan ruang laut dan pencemaran perairan, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan produk dan jasa kelautan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan;
 5. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan pemanfaatan ruang laut dan pencemaran perairan, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan produk dan jasa kelautan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan;
 6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pemanfaatan ruang laut dan pencemaran perairan, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan produk dan jasa kelautan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan; dan
 7. Urusan tata usaha dan kerumahtanggaan direktorat.

E. Struktur Organisasi



F. Sistematika Penyajian Laporan

Laporan Kinerja Direktorat PPSDK triwulan I tahun 2023 disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menguraikan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan laporan kinerja, isu aktual pengawasan sumber daya kelautan, dan tugas fungsi Direktorat PPSDK.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan secara ringkas tentang Perencanaan Pengawasan Sumber Daya Kelautan triwulan I tahun 2023.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja Direktorat PPSDK sampai dengan periode triwulan I tahun 2023.

Bab IV Penutup

Menguraikan kesimpulan dan rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang efektif, efisien dan akuntabel, Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan berpedoman pada 2 dokumen perencanaan, yaitu Renstra Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) 2020-2024 dan Rencana Kerja Direktorat PPSDK Tahun 2023.

A. Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan telah menetapkan arah kebijakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan nomor 9/PER.DJPSKDP/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan nomor: 23A/KEP.DJ-PSDKP/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024. Penetapan renstra Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2020 – 2024 bertujuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan selama 5 tahun kedepan. Dokumen renstra memuat sasaran pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan selama 5 tahun dan strategi untuk mewujudkannya.

Sasaran strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tahun 2020 - 2024 yang telah ditetapkan meliputi:

1. Tatakelola SDKP bertanggung jawab;
2. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif; dan
3. Tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk mewujudkan ketiga sasaran strategis tersebut maka telah disusun program dan indikator kinerja Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:

**Tabel 1. Program Dan Indikator Kinerja Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber
Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 – 2024**

No.	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
Program: Pengelolaan Perikanan dan Kelautan						
1.	Partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat					
	Tingkat partisipasi Pokmaswas Dalam Mendukung Pengawasan SDKP (%)	85	86	87	88	90
2.	Kepatuhan pemangku kepentingan KP meningkat					
	Persentase Kepatuhan (<i>Compliance</i>) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (%)	94	95	96	97	98
3.	Pemantauan dan Operasi Armada efektif					
	Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan <i>illegal fishing</i> (%)	54,18	60	65	70	75
	Indeks kinerja Operasi Armada Pengawasan SDKP (indeks)	86,72	87	87,5	88	89
4.	Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan tuntas					
	Persentase Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan(%)	93	93	93	93	93
Program: Dukungan Manajemen						
5.	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP					
	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) lingkup Ditjen PSDKP (nilai)	30	31	32	33	34
	Unit Kerja Ditjen PSDKP Berpredikat Menuju WBK (unit)	4	5	6	7	8
	Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK DJPSDKP (%)	1	1	1	1	1
	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (indeks)	72	73	74	75	76
	Nilai PMSAKIP Direktorat Jenderal PSDKP (nilai)	87,00	87,15	87,25	87,50	87,75
	Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit)	1	1	1	1	1
	Level maturitas SPIP lingkup Ditjen PSDKP (level)	3	3	3	3	3
	Persentase unit kerja Ditjen PSDKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	82	84	86	88	90
	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Ditjen PSDKP (%)	60	65	70	75	80
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Ditjen PSDKP (indeks)	88	89	89	90	90
	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Ditjen PSDKP (nilai)	85	86	87	88	89

B. Rencana Kerja Direktorat PPSDK Tahun 2023

Pada tahun 2023, Direktorat PPSDK mendapat alokasi anggaran sebesar Rp Rp 8.235.790.000,- namun karena kebijakan *Automatic Adjustment* maka menjadi Rp 5.947.064.000,- untuk menyelenggarakan kegiatan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan yang terdiri dari beberapa Klasifikasi Rincian Output (KRO), yaitu:

1. Pemantauan produk, yang terdiri dari Rincian *Output* (RO) sebagai berikut:
 - 1) Supervisi, monev, dan Bimtek pemeriksaan kepatuhan unit usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional, 2) Supervisi, monev, dan bimtek pemeriksaan kepatuhan unit usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks CITES, 3) Supervisi, monev, dan bimtek pemeriksaan kepatuhan unit usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan, 4) Supervisi, monev, dan bimtek pemeriksaan kepatuhan unit usaha pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut, 5) Supervisi, monev, dan bimtek pemeriksaan kepatuhan unit usaha perikanan dan non perikanan dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya, dan 6) Supervisi, monev, dan bimtek pemeriksaan kepatuhan unit usaha perikanan terhadap pelarangan kegiatan penangkapan ikan yang merusak;
2. Koordinasi pengawasan sumber daya kelautan yang terdiri dari koordinasi, sinkronisasi dan sinergi antar K/L/SKPD, pusat-daerah, dan pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan;
3. Fasilitasi dan pembinaan masyarakat yang bertujuan masyarakat yang memperoleh penyadartahuan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan; dan
4. Norma, Standard, Kriteria, Prosedur dalam rangka pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan.

Target pelaksanaan perencanaan kegiatan pengawasan bidang sumber daya kelautan tertuang dalam perjanjian kinerja. Tujuan khusus perjanjian kinerja yaitu:

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; dan
3. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Perjanjian Kinerja memuat sasaran kegiatan pelaksanaan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan yang mengacu pada Renstra Direktorat Jenderal

PSDKP Tahun 2020-2024. Untuk mewujudkan sasaran kegiatan, maka disusun indikator kinerja utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK). Indikator Kinerja Utama dan Target Kinerja Direktorat PPSDK tertuang dalam Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut:

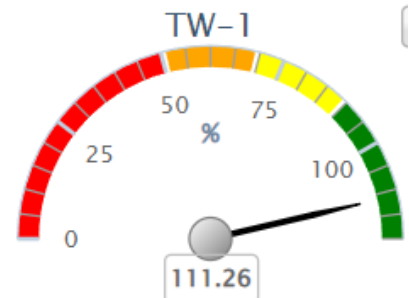
Tabel 2. Perjanjian Kinerja Direktorat PPSDK Tahun 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
KEGIATAN 1. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN			
SK1.1	Terselenggaranya penyadartahuan masyarakat bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan yang efektif	1. Nilai pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya kelautan yang bertanggung jawab (nilai)	73
SK1.2	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha kelautan yang sesuai ketentuan	2. Persentase Penyelesaian verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha kelautan (%)	80
		3. Persentase penyelesaian tindak lanjut pembinaan dan perbaikan pelaku usaha kelautan (%)	60
SK1.3	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen. PSDKP	4. Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Direktorat PPSDK (%)	100
		5. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat PPSDK (%)	100
		6. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat PPSDK (indeks)	78
		7. Tingkat pemahaman peserta Bimtek dan pelatihan lingkup Direktorat PPSDK	77
		8. Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Direktorat PPSDK	90
		9. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat PPSDK yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	75
		10. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (nilai)	21
		11. Jumlah inovasi yang dihasilkan Direktorat PPSDK (inovasi)	1
		12. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat PPSDK	92
		13. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Direktorat PPSDK (%)	77,5
		14. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Direktorat PPSDK (%)	77,5

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Triwulan I Tahun 2023

Pengukuran kinerja melalui aplikasi KINERJAKU (<http://kinerjaku.kkp.go.id/>) dilakukan dengan membandingkan capaian indikator kinerja dengan target yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja Direktorat PPSDK triwulan I tahun 2023 menunjukkan nilai 111,26. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kinerja Direktorat PPSDK pada triwulan I tahun 2023 termasuk dalam kategori sangat baik. Capaian indikator kinerja Direktorat PPSDK periode triwulan I tahun 2023 ditampilkan pada tabel berikut:



Warna	Keterangan
Istimewa	nilai 110 - 120
Baik	nilai 90 - <110
Cukup	nilai 70 - <90
Kurang	nilai 50 - <70
Sangat Kurang	untuk nilai <50
Belum ada penilaian	

Tabel 3. Capaian Kinerja Direktorat PPSDK Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	TARGET TW I	CAPAIAN TW I
1	Nilai pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya kelautan yang bertanggung jawab (nilai)	73	0	0
2	Persentase Penyelesaian verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha kelautan (%)	80	15	45,30
3	Persentase penyelesaian tindak lanjut pembinaan dan perbaikan pelaku usaha kelautan (%)	60	0	0
4	Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Direktorat PPSDK (%)	100	0	0
5	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat PPSDK (%)	100	100	100
6	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat PPSDK (indeks)	78	0	0
7	Tingkat pemahaman peserta Bimtek dan pelatihan lingkup Direktorat PPSDK	77	0	0
8	Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Direktorat PPSDK	90	0	0
9	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat PPSDK yang	75	75	75

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	TARGET TW I	CAPAIAN TW I
	dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)			
10	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	21	0	0
11	Jumlah inovasi yang dihasilkan Direktorat PPSDK (inovasi)	1	0	0
12	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat PPSDK	92	92	98,98
13	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Direktorat PPSDK (%)	77,5	0	0
14	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Direktorat PPSDK (%)	77,5	0	0

B. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja

Direktorat PPSDK telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis pada setiap sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan 1: Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan

1. Persentase Penyelesaian verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha kelautan

Pada tahun 2023, penyelesaian verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha kelautan terdiri dari penyelesaian verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha yang telah dilakukan oleh Pengawas Perikanan dan Polsus PWP3K, efektivitas pelaksanaan sengketa WP3K di luar pengadilan, dan efektivitas pelaksanaan audit tata ruang laut.

Adapun verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha oleh Pengawas Perikanan dan Polsus PWP3K adalah pelaku usaha pemanfaatan ruang laut, pemanfaatan ikan dilindungi, pemanfaatan kawasan konservasi nasional, wisata tirta lainnya, ekstraksi garam, reklamasi, dan pemanfaatan pulau-pulau kecil, penyelesaian verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha dalam pengelolaan limbah, penyelesaian verifikasi hasil pemeriksaan kapal perikanan yang tidak terindikasi DF. Verifikasi dilaksanakan terhadap laporan hasil pemeriksaan Pengawas Perikanan dan Polsus PWP3K, dimana verifikasi dilaksanakan oleh Direktorat PPSDK selaku penanggungjawab program pengawasan kelautan di Direktorat Jenderal PSDKP. Hasil verifikasi

dituangkan pada form verifikasi yang ditandatangani oleh petugas verifikasi yang ditunjuk.

Pada triwulan I, sebanyak 381 pelaku telah dilakukan pemeriksaan namun hanya 158 pelaku usaha yang sudah dilakukan verifikasi dengan rincian sebagai berikut:

No	Objek Pengawasan	Diperiksa	Diverifikasi	Prosentase
1	Pemanfaatan Ruang Laut	49	38	77,55%
2	Pemanfaatan Ikan Dilindungi / CITES	27	27	100,00%
3	Kawasan Konservasi Nasional	23	0	0,00%
4	Reklamasi	6	4	66,67%
5	Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil	12	1	8,33%
6	Wisata Tirta Lainnya	10	5	50,00%
7	Ekstraksi Garam	2	1	50,00%
8	<i>Destructive Fishing</i>	205	42	20,49%
9	Pencemaran Perairan (pengelolaan limbah)	47	40	85,11%
jumlah		381	158	458,15%
X _{pu}				50,91%

Berdasarkan hasil perhitungan maka diperoleh bahwa hanya 50,91% yang telah dilakukan verifikasi hasil pemeriksaannya. Capaian perlu ditingkatkan lagi mengingat masih banyaknya hasil pemeriksaan Pengawas Perikanan dan Polsus PWP3K yang belum diverifikasi hasilnya. Hasil pemeriksaan Pengawas Perikanan dan Polsus PWP3K seyogianya dapat diverifikasi seluruhnya, mengingat hasil verifikasi menjadi salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan kedepannya.

Sedangkan untuk efektivitas pelaksanaan sengketa WP3K di luar pengadilan pada triwulan I memperoleh capaian sebesar 85%. Sebanyak 2 sengketa telah dilakukan penetapan ganti kerugian kerusakan lingkungan sebesar Rp2.285.149.391,52. Sedangkan 2 sengketa lainnya dalam tahap klarifikasi. Adapun rincian perhitungan capaian efektivitas pelaksanaan sengketa WP3K di luar pengadilan adalah sebagai berikut:

No	Nama Kapal	Tahapan	Capaian
1	KM Sabuk Nusantara 62	Penetapan besaran ganti kerugian Rp 845.734.649,90	90%
2	TB Hosana III/ BG SMS Barito 214	Penetapan besaran ganti kerugian Rp 1.439.414.741,62	90%
3	KM Sirimau	Klarifikasi	80%
4	MT AASHI	Klarifikasi	80%
			85,00%

Adapun untuk efektivitas pelaksanaan audit tata ruang laut capaian pada triwulan

I adalah 0. Hal ini disebabkan karena kegiatan audit tata ruang laut belum dilaksanakan. Audit tata ruang laut dilaksanakan apabila ditemukan adanya indikasi perubahan fungsi ruang laut.

Setelah dilakukan penghitungan maka diperoleh capaian prosentase penyelesaian verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha kelautan sebesar 43,50%. Capaian ini telah melampaui target pada triwulan I sebesar 15%. Adapun rincian perhitungan adalah sebagai berikut:

X _{pu}	X _{sngkt}	X _{audit}	X _{btotol}
50,91%	85,00%	0%	45,30%

2. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat PPSDK (%)

Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin.

Pekerjaan yang perlu dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi (i) rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi, (ii) aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja, (iii) pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian.

Pada triwulan I tahun 2023, capaian untuk indikator ini adalah 100 %. Capaian ini mengindikasikan seluruh kegiatan dengan resiko telah dilakukan pengendalian.

3. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat PPSDK yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan

Jumlah dokumen hasil rekomendasi pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat Penagwasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan yang dalam hal ini anggaran telah menjadi 1 DIPA di bawah Sekretariat Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang periode tahun 2023 yang telah dilengkapi dan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal KKP.

Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	Tuntas (%)	Sisa Rekomendasi	Sisa Rekomendasi (%)
0	0	0	0	0

Capaian persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan SDK yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan pada periode triwulan I adalah 0, sehingga capaian nya menjadi 75%. Capaian ini telah melampaui target yaitu 75%, Nilai ini diperoleh sebagai hasil telah ditindaklanjutnya seluruh rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal KKP sampai 31 Maret 2023.

4. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat PPSDK

Perhitungan penerapan Manajemen Pengetahuan lingkup KKP dilakukan atas (i) tingkat sharing dokumen mandatory; (ii) tingkat keikutsertakan pejabat dan staf serta (iii) tingkat keaktifan unit kerja dalam SI-MP. Adapun capaian pada tahun 2023 adalah 98,98. Capaian ini telah melampaui target 92%.

Capaian ini dipengaruhi oleh penurunan keaktifan pegawai pada aplikasi bitirix. Kedepannya capaian ini masih perlu ditingkatkan melalui peningkatan partisipasi aktif pegawai Direktorat PPSDK di aplikasi bitrix kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (<http://kinerjakkp.bitrix24.com>) dan juga ketepatan penyampaian dokumen pengelolaan kinerja pada aplikasi bitrix kinerja.

C. Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran Direktorat PPSDK pada tahun 2023 adalah Rp 8.235.790.000,- namun karena kebijakan *Automatic Adjustment* maka menjadi Rp 5.947.064.000,-.

Sedangkan realisasi anggaran triwulan I adalah sebesar Rp 2.321.603.350,- sebesar 39,04% apabila dibandingkan dengan alokasi awal. Realisasi anggaran pada tersajikan pada tabel berikut:

No	Klasifikasi Rincian <i>Output</i>	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	Koordinasi	527,727,000	164,087,358
2	Normas, Stadar, Prosedur, dan Kriteria	135,798,000	38,207,718
3	Penanganan Perkara	1,335,000,000	984,874,408
4	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	1,204,289,000	515,925,553
5	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	500,000,000	0
6	Pemantauan Produk	2,100,000,000	618,508,313
Total		5.947.064.000	2.321.603.350

Beberapa hal yang mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran lingkup Direktorat PPSDK adalah sebagai berikut:

1. Adanya *automatic adjustment* yang merubah perencanaan kegiatan dan anggaran;
2. Adanya kebijakan unit kerja yang seringkali menyebabkan dilaksanakannya revisi anggaran untuk melaksanakan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Laporan kinerja Direktorat PPSDK triwulan I tahun 2023 menampilkan capaian kinerja sasaran strategis Direktorat PPSDK selama 1 triwulan yang tercermin dalam capaian indikator kinerja utama.
2. Seluruh indikator kinerja yang memiliki target pada triwulan I telah melampaui target yang telah ditetapkan dengan nilai NPSS sebesar 111,26 dan dikategorikan sangat baik;
3. Kinerja realisasi anggaran pada tahun 2023 adalah 39,04%.

B. REKOMENDASI

Beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti atas hasil evaluasi kinerja Direktorat PPSDK triwulan I tahun 2023 yaitu:

1. Percepatan pelaksanaan kegiatan sehingga bisa meningkatkan realisasi anggaran dan realisasi kegiatan;
2. Dalam hal pelaksanaan verifikasi kepatuhan hasil pengawasan pelaku usaha kelautan perlu penambahan petugas verifikator sehingga target verifikasi dapat terpenuhi;
3. Hasil pengukuran kinerja diharapkan dapat dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan.